

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
LOHA UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
DESA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Meyti Hardini Utami Siok

NPP. 32.0663

Asdaf Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: utamisiok02@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Afni Nooraini, S.IP.,M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Loha Tourism Village in West Manggarai Regency faces challenges of limited access to clean water, electricity, and lack of digital promotion, which have not fully supported the achievement of the Village Sustainable Development Goals (SDGs), particularly goals 6 (clean water), 7 (clean energy), and 17 (partnership). **Purpose:** This study aims to determine how the dynamics of Collaborative Governance in the development of Loha Tourism Village to realize the Village Sustainable Development Goals (SDGs) in West Manggarai Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method where data collection has been carried out through interviews, observation and documentation, with 12 informants and documents that are in accordance with the research needs and data sources from Primary Data and Secondary Data. **Results/Findings:** collaborative governance in Loha Tourism Village runs through three main indicators: (1) principled engagement, reflected in regular deliberations and a clear division of roles between actors; (2) shared motivation, in the form of collective commitment and trust between parties; and (3) collective action capacity, supported by institutional strengthening, community training, and optimization of local resources. The drivers of successful collaboration include interdependence, consequential incentives, and initiating leadership, while the main barriers are limited infrastructure and promotion. **Conclusion:** Collaborative governance has proven effective in strengthening tourism village management, increasing community participation, and encouraging the achievement of the Village SDGs in an inclusive and sustainable manner.

Keywords: collaborative governance, tourism village, SDGs, West Manggarai, multi-stakeholder collaboration

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Desa Wisata Loha di Kabupaten Manggarai Barat menghadapi tantangan keterbatasan akses air bersih, listrik, dan minimnya promosi digital, yang belum sepenuhnya mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, khususnya tujuan ke-6 (air bersih), ke-7 (energi bersih), dan ke-17 (kemitraan). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Loha untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Manggarai Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana telah dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan 12 informan serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian serta sumber data dari Data Primer dan Data Sekunder. **Hasil/Temuan:** *collaborative governance* di Desa Wisata Loha berjalan melalui tiga indikator utama: (1) keterlibatan yang berprinsip, tercermin dari musyawarah rutin dan pembagian peran yang jelas antar aktor; (2) motivasi bersama, berupa komitmen kolektif dan kepercayaan antar pihak; serta (3) kapasitas

aksi kolektif, yang didukung oleh penguatan kelembagaan, pelatihan masyarakat, dan optimalisasi sumber daya lokal. Faktor pendorong keberhasilan kolaborasi meliputi saling ketergantungan, insentif konsekuensial, dan kepemimpinan inisiasi, sementara hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan promosi. **Kesimpulan:** *collaborative governance* terbukti efektif dalam memperkuat pengelolaan desa wisata, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pencapaian SDGs Desa secara inklusif dan berkelanjutan di Desa Wisata Loha.

Kata Kunci: *collaborative governance*, desa wisata, SDGs, Manggarai Barat, kolaborasi multipihak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya otonomi daerah pasca-reformasi 1999 telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, di mana pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih besar untuk mengelola potensi dan permasalahan wilayahnya secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian persoalan publik tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor. Kompleksitas tantangan pembangunan dan keterbatasan sumber daya mendorong pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Konsep *collaborative governance* pun berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan tata kelola yang partisipatif dan inklusif, di mana pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dilakukan bersama oleh aktor publik dan non-publik.

Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang sangat diuntungkan oleh pendekatan kolaboratif ini. Pariwisata diakui sebagai salah satu motor penggerak ekonomi global dan nasional, menyumbang sekitar 10% dari PDB dunia dan menciptakan 25% lapangan kerja baru sebelum pandemi. Di Indonesia, pariwisata menempati posisi strategis sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Pemerintah pusat maupun daerah menempatkan pengembangan destinasi wisata, khususnya desa wisata, sebagai program prioritas yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal, melestarikan budaya, dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Buhalis dkk. (2023) menekankan pentingnya strategi pariwisata cerdas dan berkelanjutan yang berbasis kolaborasi, etika, serta kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi pariwisata menuju masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan desa wisata di Indonesia telah menunjukkan potensi besar dalam memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan, dan merevitalisasi nilai-nilai tradisional masyarakat. Studi Yanan dkk. (2024) menegaskan bahwa pariwisata pedesaan tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga harus memprioritaskan pelestarian nilai-nilai komunitas dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga tercipta hubungan simbiotik antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Sementara itu, Aziz (2023) menyoroti bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya agar pertumbuhan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta menekankan pentingnya pendekatan yang memberdayakan komunitas desa dalam pengembangan pariwisata.

Di tingkat implementasi, peran pemerintah desa sangat krusial dalam pengembangan pariwisata desa. Studi Firdaus dkk. (2021) menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, regulasi, promosi, hingga pengembangan kelembagaan secara efektif dalam pengembangan pariwisata desa, meskipun tetap membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta untuk mencapai hasil optimal.

Hal serupa juga ditemukan oleh Mulyana dkk. (2022) yang menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, promosi, dan pembinaan kelembagaan, meski pelaksanaannya masih memerlukan penguatan peran pemerintah agar pemberdayaan berjalan maksimal.

Kabupaten Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang tengah gencar mengembangkan pariwisata berbasis desa. Status Labuan Bajo sebagai destinasi super premium telah mendorong lahirnya berbagai desa wisata, termasuk Desa Wisata Loha di Kecamatan Pacar. Sejak ditetapkan sebagai desa wisata, Desa Loha menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi pengembangan potensi alam dan budaya, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga perubahan status desa dari tertinggal menjadi berkembang. Daya tarik utama Desa Wisata Loha meliputi keindahan alam seperti Air Terjun Cunca Namo, Goa Nua Waka, agrowisata, serta kekayaan kerajinan lokal yang diolah masyarakat.

Namun, pengembangan Desa Wisata Loha masih menghadapi tantangan nyata, seperti keterbatasan akses listrik, kesulitan air bersih, dan minimnya promosi wisata. Permasalahan ini tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat (Pokdarwis), dan pihak swasta seperti agen travel. Sentanu dkk. (2023) menegaskan bahwa *collaborative governance* dalam pariwisata memberikan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan pemerintah semata, karena mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan menghasilkan perencanaan strategis yang disepakati bersama. Di tingkat lokal dan regional, kolaborasi ini bahkan menghasilkan dinamika yang lebih kompleks dan mendalam karena melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Affiangit dan Dewi (2024) menyoroti bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh komitmen pelaksana kebijakan, komunikasi yang efektif, dan kesadaran masyarakat, namun juga menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman implementator, sumber daya Pokdarwis yang belum memadai, serta pengelolaan dana desa yang belum optimal. Dengan demikian, *collaborative governance* menjadi kunci dalam pengembangan Desa Wisata Loha agar dapat berjalan efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Manggarai Barat.

Praktik kolaborasi multipihak ini tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan desa wisata di tengah tantangan pembangunan daerah dan global, serta memastikan nilai-nilai lokal tetap lestari di tengah arus perubahan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai pengembangan desa wisata dengan pendekatan *collaborative governance* telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi dasar dan urgensi penelitian ini:

- a. Konteks Lokal yang Unik: Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti kolaborasi di desa wisata yang sudah mapan atau memiliki fasilitas lengkap. Sementara itu, Desa Wisata Loha masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih, yang secara langsung mempengaruhi kualitas layanan wisata dan keberlanjutan pengembangan desa.
- b. Minimnya Studi tentang Peran Aktor Lokal dan Swasta: Penelitian terdahulu umumnya menekankan peran pemerintah dan masyarakat, namun belum banyak yang mengulas secara mendalam dinamika kolaborasi antara pemerintah, Pokdarwis, dan pihak swasta (agen travel) dalam promosi dan pengembangan desa wisata, khususnya di wilayah yang baru berkembang seperti Loha.

- c. Fokus pada Implementasi SDGs Desa: Banyak kajian tentang *collaborative governance* belum secara spesifik mengaitkan proses kolaborasi dengan pencapaian tujuan SDGs Desa, terutama pada aspek kemitraan (*goal* 17), akses air bersih (*goal* 6), dan energi bersih (*goal* 7). Padahal, isu-isu ini sangat relevan dan menjadi tantangan nyata di Desa Wisata Loha.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan menganalisis secara komprehensif dinamika *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Loha serta relevansinya dalam mendukung pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengembangan desa wisata berbasis kolaborasi multipihak.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kolaborasi pemerintah dan pengembangan desa wisata. Penelitian oleh Moreta dan Harirah (2022) dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021 – 2022” menemukan bahwa dinamika kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan 2022 sudah membawa berbagai dampak positif, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta peningkatan ekonomi yang tidak dirasakan oleh masyarakat tertentu saja. Penelitian oleh Daya Arista, dkk. (2024) dengan judul “Strategi Pengembangan Desa Wisata Loha di Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur” menemukan bahwa melalui analisis SWOT dan matriks internal dan eksternal, dapat diketahui bahwa posisi Desa Wisata Loha berada diposisi pertumbuhan, yang berarti daya tarik Desa Wisata Loha berada diposisi kompetitif yang kuat. Penelitian oleh Kurniawan Agung, dkk. (2023) dengan judul “Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Banyumas Menuju Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan” menemukan bahwa beberapa wilayah desa di Kabupaten Banyumas telah menjadi desa wisata dengan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan bermitra dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, investor dan Pemerintah Daerah, dan Desa – desa tersebut memiliki berbagai karakteristik potensi yang dapat dikembangkan.

Penelitian oleh Soenarjanto, dkk. (2021) dengan judul “Pengembangan Desa Wisata Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dalam perspektif *collaborative governance*” menemukan bahwa dalam pengembangan Desa Wisata Gununganyar sudah mengalami proses *collaborative governance* yang ditandai dengan adanya bentuk kerja sama antar stakeholder, namun belum sepenuhnya berhasil karna kriteria keberhasilan yang terpenuhi hanya akses terhadap aktivitas dan kepercayaan di antara para stakeholder. Penelitian oleh M.Agung Prawira (2022) dengan judul “Kolaborasi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pantai Labombo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan” menemukan bahwa dalam pengembangan pariwisata khususnya objek wisata pantai labombo di Kota Palopo masih belum maksimal, karena masih banyak kelemahan yang ditemukan pada proses kolaborasi yang menjadi indikator pengembangan objek wisata Pantai Labombo. Penelitian oleh Mola, dkk. (2021) dengan judul “*Collaborative Governance In The Management Of Praiijing Tourism Village In Tebara Village, Waikabu-Bak City District, West Sumba Regency*” menemukan bahwa pengelolaan kampung wisata Praiijing belum berjalan secara efektif dilihat dari kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang menghasilkan model kolaborasi di kampung wisata Praiijing. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan

kampung wisata Praiijing di lapangan seperti faktor Budaya, Lembaga pengelola, anggaran, letak geografis, masyarakat, Sumber daya manusia, atraksi budaya, penataan, kebijakan pemerintah daerah, aksesibilitas daerah, teknologi, daya saing obyek wisata sejenis dan pergeseran nilai budaya yang akan menjadi tantangan kedepan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang banyak memfokuskan pada pengembangan desa wisata di daerah dengan karakteristik geografis, sosial, dan fasilitas yang berbeda, serta menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi (Moreta & Harirah, 2022; Daya Arista dkk., 2024; Kurniawan Agung dkk., 2023; Soenarjanto dkk., 2021; M. Agung Prawira, 2022; Mola dkk., 2021). Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Moreta & Harirah (2022) di Nagari Tuo Pariangan, Kurniawan Agung dkk. (2023) di Banyumas, dan Mola dkk. (2021) di Praiijing, lebih menekankan pada dinamika kolaborasi dan pengelolaan desa wisata di daerah yang telah memiliki fasilitas penunjang pariwisata yang relatif berkembang atau berada di wilayah yang berbeda karakteristiknya dengan Desa Wisata Loha.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada Desa Wisata Loha di Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan fasilitas yang unik. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *collaborative governance* secara spesifik dalam konteks pengembangan desa wisata untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dinamika *collaborative governance* dalam pengembangan Desa wisata Loha dalam mewujudkan *sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Kabupaten Manggarai Barat.

II. METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses, dinamika, dan makna kolaborasi antar-aktor dalam pengembangan Desa Wisata Loha menuju pencapaian SDGs Desa. Metode kualitatif sangat sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, khususnya ketika peneliti ingin menangkap pengalaman, persepsi, serta interaksi para pelaku di lapangan secara naturalistik dan kontekstual (Simangunsong, 2017)

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*. Informan kunci dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan posisi strategis dalam *collaborative governance* pengembangan Desa Wisata Loha. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Pokdarwis Desa Loha, dan Manager Flores Overland Tour. Selain itu, informan tambahan terdiri dari 9 (sembilan) orang seperti Sekretaris Desa, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Analis Pariwisata, dan masyarakat lokal dipilih untuk memperkaya data melalui teknik *snowball sampling*, sebagaimana disarankan oleh Sugiyono (2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Loha, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penelitian lapangan berlangsung selama satu bulan, yaitu pada Januari 2025, dengan proses analisis dan penulisan laporan dilakukan hingga Maret 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dinamika *collaborative governance* dalam pengembangan Desa wisata Loha dalam mewujudkan *sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Kabupaten Manggarai Barat menggunakan konsep *collaborative governance regimes* dari Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis, yang menyebutkan bahwa *collaborative governance* terdiri dari dua dimensi yaitu; dinamika kolaborasi dan *drivers*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1 Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Loha menggambarkan proses interaksi dan keterlibatan berbagai aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pihak swasta. Berdasarkan kerangka Emerson dan Nabatchi (2015), dinamika ini mencakup tiga aspek utama: keterlibatan yang berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk aksi kolektif.

Keterlibatan yang Berprinsip

Keterlibatan yang berprinsip tampak jelas sejak tahap awal penetapan Desa Loha sebagai desa wisata. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan, menetapkan kriteria 4A (*access, amenity, attraction, ancillary*) sebagai syarat utama desa wisata. Proses ini dimulai dengan identifikasi potensi desa, diikuti pembentukan kelompok milenial yang kemudian menginisiasi berbagai upaya pengembangan.

Pada tahap penemuan, masing-masing pihak menemukan peluang dan tantangan pengembangan wisata. Pemerintah melihat kolaborasi sebagai upaya bersama untuk kemajuan pariwisata, pihak swasta menekankan pentingnya kemitraan yang saling menguntungkan, sedangkan masyarakat—terutama melalui Pokdarwis—memaknai kolaborasi sebagai kerja sama lintas pihak dengan peran yang jelas.

Diskusi dan musyawarah rutin menjadi mekanisme deliberasi utama. Pemerintah desa secara aktif mengundang masyarakat dan Pokdarwis untuk membahas permasalahan, bahkan menyesuaikan waktu pertemuan agar partisipasi tetap tinggi. Penentuan keputusan, seperti penetapan status desa wisata dan pembentukan kelompok kerja, dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak, termasuk pertimbangan potensi dan keterbatasan infrastruktur.

Motivasi Bersama

Motivasi bersama dalam kolaborasi ini tercermin dari tingginya kepercayaan antar-aktor. Pokdarwis dan masyarakat percaya pada pemerintah sebagai fasilitator, dan pada pihak swasta sebagai mitra promosi dan pemasaran. Kesepahaman dibangun melalui proses edukasi dan sosialisasi, terutama kepada masyarakat yang awalnya ragu beralih dari profesi petani ke sektor pariwisata.

Legitimasi internal juga terbentuk seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pokdarwis dan pemerintah desa. Komitmen bersama diperkuat dengan adanya

kerjasama formal, seperti MOU dengan pihak swasta dan lembaga keuangan, serta keterlibatan aktif dalam promosi dan pengelolaan objek wisata.

Kapasitas untuk Melakukan Aksi Bersama

Kapasitas kolektif diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan regulasi, seperti Perda No. 4 Tahun 2014 dan SK Bupati tentang penetapan Desa Loha sebagai desa wisata. Kepemimpinan fasilitatif dari Dinas Pariwisata dan Pokdarwis mendorong partisipasi dan inovasi di tingkat desa.

Pengetahuan dan keterampilan masyarakat terus ditingkatkan melalui pelatihan oleh Disparekrafbud, mencakup penataan desa, kuliner, pemasaran digital, hingga *story telling* untuk pemandu wisata. Sumber daya pendukung, baik dana desa maupun potensi alam seperti Air Terjun Sunsa Namo dan Gua Nua Waka, dioptimalkan untuk mendukung pengembangan wisata yang berkelanjutan.

3.2 Drivers

Empat faktor pendorong utama menurut Emerson dan Nabatchi (2015) sangat relevan dalam konteks Desa Wisata Loha:

Ketidakpastian

Pengembangan desa wisata penuh ketidakpastian, terutama terkait keberlanjutan, pemasaran, hingga kesiapan infrastruktur. Tantangan ini mendorong perlunya kolaborasi lintas sektor agar solusi yang dihasilkan lebih adaptif dan inovatif.

Saling Ketergantungan

Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengembangkan desa wisata secara mandiri. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat dan dukungan swasta, sementara masyarakat dan Pokdarwis memerlukan fasilitasi serta akses pasar dari pemerintah dan mitra bisnis. Saling ketergantungan ini memperkuat alasan untuk berkolaborasi.

Insentif Konsekuensial

Insentif yang dihadirkan bukan hanya ekonomi, seperti bertambahnya pendapatan masyarakat dari pariwisata, tetapi juga insentif sosial dan pengakuan, seperti meningkatnya citra desa dan peluang pengembangan lebih lanjut. Status Labuan Bajo sebagai destinasi super premium turut menciptakan insentif eksternal bagi desa-desa di sekitarnya, termasuk Loha.

Kepemimpinan Inisiasi

Kepemimpinan inisiasi sangat penting dalam membangun kepercayaan dan menggerakkan kolaborasi awal. Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator, sementara milenial desa dan Pokdarwis menjadi motor penggerak di tingkat lokal. Kepemimpinan yang adaptif dan responsif mempercepat proses pembentukan kolaborasi dan memastikan keberlanjutannya.

Secara keseluruhan, dinamika kolaborasi dan faktor pendorong yang teridentifikasi di Desa Wisata Loha menunjukkan bahwa *collaborative governance* dapat menjadi strategi efektif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat desa. Kolaborasi lintas aktor, penguatan kapasitas, serta kepemimpinan yang inklusif menjadi kunci utama dalam proses ini.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Loha untuk mewujudkan SDGs Desa di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan sejumlah kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta memperkuat beberapa temuan yang telah ada.

Sama halnya dengan temuan Moreta dan Harirah (2022) di Nagari Tuo Pariangan, penelitian ini membuktikan bahwa dinamika kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan ekonomi lokal. Di Desa Wisata Loha, kolaborasi lintas aktor juga terbukti mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui Pokdarwis, serta memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator dan pihak swasta sebagai mitra promosi dan pemasaran. Namun, berbeda dengan penelitian di Pariangan yang menemukan masih adanya masyarakat yang belum memahami peran mereka dalam destinasi wisata, di Loha, proses musyawarah dan edukasi yang intensif telah membangun kesepahaman yang lebih merata di antara para aktor lokal, meskipun tantangan awal tetap ada.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Daya Arista dkk. (2024) yang menempatkan Desa Wisata Loha pada posisi pertumbuhan yang kompetitif. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menambahkan bahwa pertumbuhan tersebut didukung oleh dinamika kolaborasi yang adaptif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kepemimpinan fasilitatif yang mampu menggerakkan inovasi dan pelatihan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbeda dengan hasil penelitian Soenarjanto dkk. (2021) di Desa Wisata Gununganyar, di mana *collaborative governance* belum sepenuhnya berhasil karena hanya terbatas pada akses aktivitas dan kepercayaan antar stakeholder, di Desa Wisata Loha ditemukan bahwa kolaborasi telah berkembang hingga pada tahap komitmen bersama, penguatan legitimasi internal, serta pembagian peran yang jelas. Hal ini tampak dari adanya MOU antara pemerintah desa dan pihak swasta, serta pelibatan aktif masyarakat dalam promosi dan pengelolaan wisata.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Kurniawan Agung dkk. (2023) mengenai pentingnya kolaborasi multipihak dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Di Loha, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta tidak hanya terbatas pada pengelolaan, tetapi juga pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, dan pengembangan produk lokal, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian SDGs Desa.

Namun, berbeda dengan penelitian M. Agung Prawira (2022) tentang kolaborasi di Pantai Labombo, Kota Palopo, yang menemukan bahwa proses kolaborasi masih belum maksimal karena adanya kelemahan dalam komunikasi dan pembagian peran, di Desa Wisata Loha, komunikasi dan musyawarah rutin menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan kesepahaman antaraktor, meskipun tantangan terkait keterbatasan infrastruktur dan promosi masih ada.

Sementara itu, penelitian Mola dkk. (2021) di Kampung Wisata Praiijng menyoroti bahwa efektivitas *collaborative governance* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti budaya, kelembagaan, anggaran, dan aksesibilitas. Temuan ini juga relevan dengan konteks Loha, di mana tantangan utama berupa keterbatasan listrik, air bersih, dan promosi digital masih menjadi hambatan yang harus diatasi melalui kolaborasi lintas aktor yang lebih inovatif dan adaptif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat literatur bahwa *collaborative governance* merupakan strategi efektif dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi, komitmen bersama, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan lokal

secara adaptif. Temuan ini juga menolak anggapan bahwa kolaborasi hanya sebatas formalitas, karena di Desa Wisata Loha, kolaborasi telah berkembang menjadi praktik nyata yang berdampak pada peningkatan ekonomi, sosial, dan pelestarian budaya, serta mendukung pencapaian SDGs Desa secara lebih terukur dan inklusif

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Loha antara lain adanya saling ketergantungan antar pihak, kegagalan menangani masalah menjadi kecil, insentif konsekuensial dan kepemimpinan yang inisiasi, serta faktor yang menjadi penghambat sekaligus menyebabkan kegagalan ialah ketidakpastian antar pihak, masalah sosial dan ketidaksediaan sumber daya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Loha yaitu dengan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Desa agar segera ditindaklanjuti pembangunan difasilitas objek wisata yang ada di Desa Wisata Loha dan Pemerintah Desa dapat memfasilitasi promosi terkait destinasi wisata di Desa Wisata Loha.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Loha terbukti berjalan efektif dan adaptif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa. Kolaborasi antara pemerintah, Pokdarwis, dan pihak swasta tidak hanya memperkuat pengelolaan potensi wisata dan partisipasi masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi serta peningkatan kapasitas lokal melalui musyawarah rutin, pembagian peran yang jelas, dan komitmen bersama. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya di berbagai desa wisata di Indonesia, seperti Desa Wisata Pela dan Wukirsari, yang menegaskan pentingnya keterlibatan multiaktor dan hubungan yang setara dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi, penguatan kelembagaan, serta kemampuan mengatasi tantangan lokal seperti keterbatasan infrastruktur dan promosi digital. Dengan demikian, praktik kolaborasi multipihak di Desa Wisata Loha dapat menjadi model pengembangan desa wisata yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan untuk diterapkan di wilayah lain di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yang terletak pada aspek waktu dan biaya penelitian yang relatif terbatas, sehingga pelaksanaan pengumpulan data di lapangan tidak dapat dilakukan secara lebih luas dan mendalam. Selain itu, penelitian ini hanya melibatkan sejumlah informan kunci dan peserta dari beberapa jenis pelatihan yang ada di Desa Wisata Loha, sehingga cakupan data yang diperoleh belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh dinamika dan pengalaman masyarakat maupun pihak terkait lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan pada kajian dampak jangka panjang *collaborative governance* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan desa. Penelitian lanjutan juga penting untuk mengeksplorasi peran inovasi digital dan kolaborasi multipihak dalam memperkuat promosi, pengelolaan, serta pelayanan wisata secara berkelanjutan, khususnya di tengah tantangan keterbatasan infrastruktur dan perubahan kebutuhan wisatawan. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat

memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif untuk pengembangan desa wisata yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global dan lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Ibu Afni Nooraini, S.IP., M.Si. selaku pembimbing dalam penelitian ini, perangkat Desa Wisata Loha yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Affiangit, T., & Dewi, M. F. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata di Desa Somongari. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 181-195. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4655>
- Aziz, R. C. (2023). "Chapter 20: Sustainable tourism development in rural areas: an alternative paradigm using the appreciative inquiry approach". In *Handbook on Tourism and Rural Community Development*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Retrieved May 26, 2025, from <https://doi.org/10.4337/9781800370067.00029>
- Buhalis, D., dkk. (2023). Tourism 2030 and the contribution to the sustainable development goals: the tourism review viewpoint. *Tourism review*, 78(2), 293-313. <https://doi.org/10.1108/TR-04-2023-620>
- Daya, R. C. A. (2023). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Loha di Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Dhyana Pura).
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, Vol.22(1), Hal. 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Firdaus, Hardjosoekarto, S., & Lawang, R. M. (2021). The Role of Local Government on Rural Tourism Development: Case Study of Desa Wisata Pujonkidul, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(7), 1299-1307. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160710>
- Kurniawan, A., Wulan, T. R., & Muslihudin, M. (2023). Pengembangan potensi Desa Wisata di Banyumas menuju pembangunan perdesaan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, Vol.8(5), Hal.169-181. <https://doi.org/10.37149/JIMDP.v8i5.334>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance In The Management Of Praiijng Tourism Village In Tebara Village, Waikabu-Bak City District, West Sumba Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140-148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Moreta, A., & Harirah, Z. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022. *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 3(3) Hal.106-112. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.180>
- Mulyana, M., Pawan, A., & Maabuat, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Tondok Bakar di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(2), 16-32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2797>

- Prawira, M. A. (2022). *Kolaborasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pantai Labombo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintah Dalam Negeri).
- Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. ., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and successes in collaborative tourism governance: A systematic literature review. *European Journal of Tourism Research*, 33, 3302. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669>
- Simangunsong. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soenarjanto, B., Yuliyanti, T., & Darmawan, A. (2021). Pengembangan Desa Wisata Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Collaborative Governance. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), Vol.1(03), Hal.1-9. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/201>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Yanan, L., Ismail, M. A., & Aminuddin, A. (2024). How has rural tourism influenced the sustainable development of traditional villages? A systematic literature review. *Heliyon*, 10(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25627>

